

## CONTRIBUTION OF MULTICULTURAL VALUES IN PREVENTING RADICALISM IN SOCIETY

Hasdin<sup>1</sup>

Alri Lande<sup>2</sup>

Windi Makmur<sup>3</sup>

Program Studi PPKn FKIP UNTAD. E-mail: hasdinbangkep@gmail.com

Program Studi PPKn FKIP UNTAD. E-mail: alrilande@gmail.com

Program Studi PPKn FKIP UNTAD. E-mail: windi@gmail.com

### ABSTRACT

*The diversity of ethnic groups, cultures, ethnicities, languages, races and religions makes Indonesia a multicultural country. This diversity has become a very fascinating mosaic as well as very prone to conflict. The inability to care for diversity can result in an exclusive attitude that can trigger social conflicts with SARA nuances, which are worrying and can disrupt the order of social life based on Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila and the 1945 Constitution within the framework of the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The diversity that exists in Indonesia makes the concept of multicultural values very urgent to be immediately developed and implemented in social life. One of the efforts made to create and build mutual respect (mutual respect), mutual understanding (mutual understanding), and mutual trust (mutual trust) to the differences that exist in society is to instill multicultural-based values. Thus, the inculcation of multicultural values can be seen if in the implementation of coaching the community succeeds in forming and building good character in each individual to be mutually tolerant, not hostile and not in conflict caused by differences in ethnicity, culture, ethnicity, language, race and religion.*

**Keywords:** Socialization; Multicultural Values; Radicalism

### I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan keanekaragaman suku bangsa, budaya, Bahasa, ras dan agama. Indonesia adalah salah satu negara multicultural terbesar di dunia. Hal tersebut terlihat jelas dari sosio kultur dan geografis Indonesia. Sehingga kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia harus dipelihara dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi PPKn FKIP UNTAD

<sup>2</sup> Dosen Program Studi PPKn FKIP UNTAD

<sup>3</sup> Dosen Program Studi PPKn FKIP UNTAD

Negara Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada. Kemajemukan Indonesia dapat dibuktikan melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda. Dalam masyarakat majemuk, terdapat structural sosial masyarakat yang pada dasarnya terbagi dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, Bahasa, adat istiadat dan agama. Sedangkan dimensi vertikal menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan maupun budaya.

Keragaman multidimensional membentuk mozaik ke-Indonesiaan yang mempesona sekaligus sangat rawan terjadinya konflik. Namun ketidakmampuan merawat keragaman, dapat mengakibatkan terjadinya sikap eksklusifisme yang sewaktu-waktu dapat menyurut terjadinya percikan gejolak sosial yang bernuansa SARA, bahkan berakibat menjadi konflik sosial horizontal yang luas dan berkepanjangan. Seperti tragedi konflik yang terjadi di ambon dan Poso (konflik antar agama), Sambas dan Sampit (konflik antar etnis Dayak/Melayu dengan Madura), dan beberapa wilayah di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu seperti Nunu, Tavanjuka dan Pengawu (konflik antar desa).

Hal tersebut merupakan contoh konflik sosial horizontal berlatar belakang multibudaya, yang menghawatirkan dan dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya penanganan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat bukan hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan semata, melainkan dengan strategi khusus sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2012 Pasal 6 Ayat 1 (d) tentang pencegahan konflik dilakukan dengan upaya membangun system peringatan dini. Dengan demikian, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik, dibutuhkan system peringatan dini melalui penanaman nilai-nilai multicultural dalam masyarakat, dengan cara menanamkan sifat atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan sebagai acuan bertingkah laku dan diimplementasikan

dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan hidup saling berdampingan secara damai baik itu antar budaya, suku, etnis, kelas sosial, dan agama.

Secara umum, penanaman nilai merupakan suatu tindakan, perilaku atau proses menanamkan suatu kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan yang pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Sementara konsep multikultural secara umum adalah keberagaman budaya. Selain itu, konsep multikultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Adapun secara hakiki, dalam kata multikultural terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Choirul Mahfud, 2008)<sup>4</sup>.

Multikultural merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditolak di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara bangsa di dunia yang meniscayakan multi-etnik dan agama tumbuh dalam masyarakat pluralis. Multikulturalisme adalah suatu konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam atau multikultur.

Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok etnik atau budaya yang dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *coexistence* yang ditandai oleh ketersediaan untuk menghormati budaya lain (Nani dan Ahmad, 2001). Sehingga multikulturalisme tidak hanya mengakui adanya keberagaman budaya, melainkan juga menghendaki adanya penghormatan dari masing-masing budaya yang berbeda.

Paradigma multikultural memberi pelajaran kepada setiap individu untuk memiliki apresiasi dan *respect* terhadap budaya dan agama-agama lain. Atas dasar ini, maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-

---

<sup>4</sup> Mahfud Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian (Salmiwati, 2013)<sup>5</sup>.

Penanaman nilai-nilai multikultural dilakukan dengan mengenalkan keragaman budaya dan untuk menghargai perbedaan yang terdapat dimasyarakat pada umumnya. Artinya penanaman nilai-nilai multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu keniscayaan (*sunnatullah*). kemudian bagaimana menyikapi perbedaan yang ada dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai multikultural menawarkan konsep yang berbasis pada pemanfaatan keragaman masyarakat.

Para pakar atau ahli memiliki visi yang berbeda dalam memandang multikultural, selain itu para ahli memiliki tekanan yang beragam dalam memahami fenomena multikultural, sehingga para ahli tetap mempertahankan adanya dominasi kelompok tertentu untuk benar-benar menekankan pada multikultural. Pengenalan sudut pandang para ahli teori multikultural sangat membantu dalam pelaksanaan di lapangan.

Nilai-nilai multikultural menurut James A Banks adalah nilai-nilai yang dibangun atas kesadaran bahwa keragaman adalah sebuah keniscayaan bagi umat manusia. Tidak hanya pada tataran percaya atas keragaman alamiah manusia, tetapi perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan orang lain (James A Banks & Cherry A. McGee Banks, t.th). Sementara itu, Gollnick dan Chinn menjelaskan bahwa nilai-nilai multikultural adalah pemahaman, pengakuan, dan penerapan pentingnya nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan keadilan dalam bersikap dan berhubungan dengan orang lain yang mempunyai latar belakang kultural berbeda seperti: agama, ras, etnis, bahasa, asal suku bangsa, perbedaan kemampuan (*disability*), umur, kelas sosial

---

<sup>5</sup> Salmiwati, *Urgensi Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Nilai-nilai Multikultural*, Jurnal Ta'lim Vol. 20, No.1(2013).

dan lain-lain (Donna M. G & Philip C. Chinn, 1998)<sup>6</sup>. Dengan demikian, pada dasarnya multikultural adalah mengakui dan menghargai keberagaman yang sangat membantu terjadinya perubahan perilaku sosial yang kondusif dan keharmonisan masyarakat yang majemuk.

Berdasarkan konsep nilai-nilai multikultural yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai multikultural adalah nilai-nilai yang dibangun atas dasar keragaman kebudayaan yang mana keragaman masyarakat tersebut bukan hanya sekedar teori semata, namun lebih pada pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari

Sementara itu menurut H.A.R Tilaar dalam Maemunah (2007: 77-95) menjelaskan beberapa nilai-nilai multikultural yang ada, sekurang-kurangnya terdapat indikator-indikator sebagai berikut: belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan. Sedangkan untuk memahami nilai-nilai multikultural secara umum terdapat empat nilai inti (*core values*) antara lain: *pertama*, apresiasi terhadap adanya kenyataan kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat. *Kedua*, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. *Ketiga*, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Menurut Abdullah Aly terdapat terdapat kesesuaian antara nilai-nilai multikultural dalam perspektif barat dengan nilai-nilai multikultural dalam perspektif Islam. Namun demikian, sumber kebenaran dari nilai-nilai multikultural tersebut berbeda. Jika nilai-nilai multikultural dalam perspektif Barat bersumber dari filsafat yang bertumpu pada hak-hak asasi manusia, maka nilai-nilai multikultural dalam perspektif Islam bersumber dari wahyu (Abdullah Aly, 2011)<sup>7</sup>. Akan tetapi nilai-nilai multikultural sejalan dengan prinsip Islam

---

<sup>6</sup> Banks A James, *An Introduction to Multicultural Education*, Cet. IV; Boston: Pearson, 2008.  
,and Cherry A. McGee Banks, Ed. *Multicultural Education: Issues and Perspectives* Seattle and Bothel: Jhon Wiley & Sons Inc., 2010.

<sup>7</sup> Aly Abdullah, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka

dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut:

#### 1. Kesetaraan

Kesetaraan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Manusia ditakdirkan sama derajat dan memiliki peran masing-masing untuk saling melengkapi, memperlakukan orang lain sama dan sederajat. Adapun indikator kesetaraan antara lain: *Pertama*, persamaan derajat tanpa melihat agama, sukubangsa, ras, gender dan golongan. *Kedua*, persamaan hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran serta pelayanan masyarakat. *Ketiga*, persamaan hak dan kewajiban sebagai hamba Tuhan, sebagai individu dan anggota masyarakat.

Keragaman dalam masyarakat, serta merta mempunyai dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melainkan keragaman juga dapat berpotensi negatif yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah masyarakat seperti, kesenjangan multidimensional, konflik antar etnis, konflik antar pemeluk agama dan berbagai kesenjangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran untuk menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan antar masyarakat.

#### 2. Keadilan

Keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia dengan perlakuan tidak pandang bulu. Dengan kata lain konsep keadilan adalah kesadaran untuk memperlakukan orang lain (masyarakat) tidak berat sebelah/tidak memihak dan tidak membedakan keberpihakan kepada sesama karena perbedaan warna kulit, golongan, suku, agama, ekonomi, jenis kelamin dan sebagainya (Kementerian agama, 2011). Indikator nilai keadilan sebagai berikut. *Pertama*, memperlakukan individu tanpa melihat perbedaan yang ada. *Kedua*, adanya kesempatan yang sama dalam pelayanan publik. *Ketiga*, menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang.

---

Belajar, 2001.

### 3. Demokrasi atau Kebebasan

Konsep demokrasi memandang semua manusia hakikatnya hamba Tuhan saja, sama sekali bukan hamba sesama manusia. Berakar dari konsep ini, maka manusia dalam pandangan agama mempunyai kemerdekaan dalam memilih profesi, dalam menentukan pilihan agamapun tidak dapat dipaksa. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku. Singkatnya demokrasi adalah pelebangaandari kebebasan (Mulyana,2005)<sup>8</sup>. Demokrasi memiliki nilai-nilai, antara lain: kebebasan, hak-hak individu, tujuan bersama, keadilan, dan patriotisme. Sebagai salah satu nilai demokrasi, kesadaran akan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat perlu ditanamkan dalam diri setiap individu (Zamroni,2011)<sup>9</sup>.

### 4. Toleransi

Konsep toleransi yang merupakan kemampuan untuk menghormati sifat dasar, keyakinan dan perilaku yang dimiliki oleh orang lain. Toleransi juga dipahami sebagai sebagai sifat atau sikap menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian (pandangan) orang lain yang bertentangan dengan pandangan kita. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum (Salmiwati, 2013).

---

<sup>8</sup> Mulyana, *Demokrasi Dalam Budaya Lokal*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005. Salmiwati, *Urgensi Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Nilai-nilai Multikultural*, Jurnal Ta'lim Vol. 20, No.1(2013)

<sup>9</sup> Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011)

## II. METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dalam Bentuk Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang pentingnya Nilai-Nilai Multikultur dalam Mencegah Radikalisme dan terorisme pada Masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Nilai-nilai Multikultural menurut Islam

Multikultural menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak dapat diingkari. Setiap orang akan menghadapi kemajemukan dimanapun dan dalam hal apapun (Mundzier Suparta, 2008)<sup>10</sup>. *Statement* ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai multikultural karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Sebagai sebuah kitab petunjuk yang universal, Alquran mengandung ayat-ayat yang berisi tuntunan-tuntunan dan asas-asas peraturan yang sangat dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupannya, baik yang berhubungan dengan keimanan maupun prinsip-prinsip yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia baik secara individu maupun kelompok. Berkaitan dengan multikultural, Islam juga memuat ajaran-ajaran yang sejalan dengan nilai-nilai multikultural antara lain: 1) Nilai Kesetaraan (*al-musawah*), 2) Nilai keadilan (*al- adl*), 3) Toleransi (*al-tasamuh*), 4) Musyawarah.

### B. Nilai-nilai Multikultural dalam Perspektif Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa, maka dalam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai multikultural menjadi rujukan penting agar tidak terjadi gesekan kepentingan dalam bermasyarakat. Pancasila dijadikan satu-satunya sumber dan dasar dalam

---

<sup>10</sup> Suparta Mundzier, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi Atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Al Ghazali Center, 2008.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebab setiap sila dari Pancasila terdapat nilai-nilai multikultural (Slamet, 2017)<sup>11</sup>.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama terkait dengan hubungan masyarakat antar umat beragama. Nilai-nilai itu antara lain: takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengormati pada agama kepercayaan lain (nilai toleransi), kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah persamaan derajat (nilai kesetaraan), penghargaan hak asasi manusia, nilai solidaritas, nilai keadilan.

3. Sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai nasionalisme.

4. Sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, nilai-nilai yang terkandung adalah nilai musyawarah.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada sila terakhir ini nilai-nilai yang terkandung adalah nilai keadilan dan nilai kesetaraan.

Sementara, dampak yang akan muncul jika masyarakat tidak memahami nilai-nilai multikultural antara lain:

1. Pemersatu bangsa, bahwa melalui perbedaan tersebut masyarakat dapat membuat satu kekuatan berlandaskan perbedaan, jika masyarakat atau individu tidak memahaminya dan tidak melaksanakannya pastinya akan terjadi konflik antar golongan, bentrok antar dua budaya, antar etnis akan saling bentrok. Dan itu akan merusak persatuan bangsa kita, akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan bahkan akan meruntuhkan bangsa.

2. Apabila masyarakat tidak mau saling menghargai maka kelangsungan kehidupan bangsa akan terancam, banyak pilihan atau kelompok yang akan

---

<sup>11</sup> Slamet, *Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Nilai-Nilai Multikultural Bagi Guru Sejarah SMA, Disertasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2017.

memberontak kepada negara dan jika sampai terjadi perpecahan maka etnis minoritas akan menjadi korban dari perpecahan tersebut.

3. Dengan memahami perbedaan maka individu akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari etnis lain, dengan mengetahui perbedaan tersebut tujuannya agar dapat mencontoh dan mengambil hal-hal yang baik dari masing-masing etnis.

Dengan demikian, untuk membumikan konsep nilai-nilai multikultur pada tataran praktis dapat dimulai dengan mengembangkannya dalam kegiatan pendampingan masyarakat dengan cara meletakkan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial atau situasi real tertentu yang memungkinkan individu dapat mencerminkan tentang identitas dirinya dalam masyarakat serta mampu melihat identitas orang lain yang berbeda dengan dirinya. Dengan harapan terbentuknya *good character* sehingga terwujudnya masyarakat damai dan harmonis.

Masyarakat merupakan satu komponen penting dalam bangsa yang harus senantiasa dijaga, dididik dan dibina perilakunya agar dapat menjadi Masyarakat yang bisa diandalkan untuk mengemban estapet pembangunan bangsa dan Negara. Inti cita-cita Reformasi adalah terbentuknya sebuah masyarakat yang demokratis dalam sebuah tatanan kebinekaan. Hasil reformasi ini adalah, bahwa masyarakat Indonesia yang bercorak majemuk (*Plural society*) dan di geser menjadi masyarakat multikulturalisme, namun untuk menciptakan tatanan masyarakat multikulturalisme tentu tidak Mudah. Paling tidak dibutuhkan sebuah konsep untuk mendukung penanaman suatu nilai untuk terwujudnya tatanan masyarakat multukultur yang betul-betul berpijak pada konsep yang kuat dan tidak mudah terombang ambing oleh kondisi lingkungan dan pemahaman gaya baru di era glabalisasi saat ini.

Glabalisasi sendiri merupakan suatu keniscayaan dalam dalam proses perkembangan bangsa saat ini. Pertanyaan kemudian sejauh mana bangsa ini menyiapkan masyarakatnya untuk kemudian bisa tidak terpengaruh oleh dampak negatif yang di timbulkan. Sebab seperti pernah di ungkapkan oleh Prof Sartono Kartodirjo di depan peserta lokakarya nasional majemen sumber daya manusia di

hotel Ambarukmo Yogyakarta (Kompas, 5/3/88)<sup>12</sup>, bahwa proses industrialisasi dengan penerapan teknologi modern memaksakan manusia/masyarakat melakukan berbagai adaptasi, tentu yang dimaksud oleh Prof termaksud adaptasi Budaya Baru yang bisa saja bertentangan dengan kebudayaan Bangsa Kita yang bisa membentuk kecenderungan sifat masyarakat Global.

Maka di perlukan sosialisasi guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Nilai-nilai Multikultur dalam masyarakat. Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan (<http://kbbi.web.id/sosialisasi>,2019)<sup>13</sup>. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai.

Lingkungan sosial yang paling luas adalah masyarakat. Untuk itu upaya memberikan pengenalan nilai-nilai multikulturalisme tentu di mulai dari masyarakat luas. Sehingga pemahaman terhadap Keberagaman dalam kehidupan mampu untuk di terima oleh masyarakat itu sendiri sehingga tidak timbul radikalisme dalam masyarakat bahwa dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme yang kian menguat di Indonesia, pendekatan yang dapat digunakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat Indonesia adalah pendekatan kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional sendiri didefinisikan sebagai suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, serta melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu ancaman.

---

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id/sosialisasi>. Diakses tanggal 10 April 202

<sup>13</sup> <http://kbbi.web.id/sosialisasi>. Diakses tanggal 10 April 202

Dengan berpijak pada pendekatan kewaspadaan nasional tersebut, maka upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memerangi radikalisme, termasuk di dalamnya terorisme, seyogianya bersifat mitigatif dan jangka panjang. Ada tiga upaya yang bisa dilakukan, yakni penguatan pemahaman nilai Pancasila yang dilakukan secara struktural oleh lembaga negara, penguatan literasi digital di masyarakat, serta upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mana kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan akar masalah dari munculnya radikalisme dan terorisme itu sendiri. Penjelasan secara mendetil mengenai ketiga langkah tersebut sebagai berikut:

1) Penguatan Pemahaman Nilai Pancasila yang Dilakukan Secara Struktural Oleh Lembaga Negara.

Apabila kita merujuk kembali kepada sejarah perjuangan bangsa Indonesia di masa lampau, maka tidak dimungkiri bahwa tidak ada keraguan terhadap Pancasila sebagai ideologi yang paripurna dan paling relevan dengan corak keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Berbagai upaya untuk meruntuhkan kedaulatan RI pada masa awal kemerdekaan seperti pemberontakan DI/TII dan NII, RMS, Permesta, hingga pemberontakan PKI pada 1948 dan 1965, semuanya dapat ditumpas karena resiliensi atau ketangguhan yang dimiliki oleh Pancasila sendiri sebagai dasar negara.

Pancasila semakin kukuh eksistensinya, baik sebagai dasar negara, maupun dasar filsafat Dewasa ini, Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa dibutuhkan peran serta lembaga negara secara struktural dalam mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, sebagai sarana mitigatif terhadap berkembangnya radikalisme dan terorisme. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI misalnya, secara konsisten menjalankan sosialisasi empat pilar kebangsaan ke berbagai lapisan masyarakat. Lembaga Ketahanan Nasional Republik secara gigih menjalankan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang menyasar berbagai komponen masyarakat. Bahkan untuk menyinergikan berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, Pemerintah

Indonesia membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

2) Penguatan Literasi Digital di Masyarakat Guna Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial.

Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, penggunaan media sosial oleh masyarakat telah semakin masif. Masyarakat memiliki kemudahan untuk mengakses berbagai informasi melalui internet di mana saja dan kapan saja. Hanya saja sangat disayangkan, di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, penggunaan media sosial justru digunakan untuk menyebarkan kebencian atas nama kelompok, golongan, suku, dan agama tertentu. Inilah yang menjadi bahan bakar menguatnya aksi-aksi radikalisme dan terorisme di masyarakat. Hal ini koinsiden dengan kondisi masyarakat Indonesia sendiri yang belum memiliki literasi digital yang baik. Masyarakat sangat mudah terprovokasi untuk bertindak reaktif dan reaksioner dalam menyikapi berbagai provokasi tersebut.

Oleh sebab itu, penguatan literasi digital mutlak dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme. Sedikitnya ada lima hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, diadopsinya program literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan. Kedua, pelaksanaan program literasi digital yang dilakukan secara lintas sektor. Ketiga, dibutuhkan basis data digital secara nasional sebagai panduan pelaksanaan program. Keempat, program literasi digital harus didampingi oleh penegakan hukum yang kuat oleh pemerintah. Terakhir, dibutuhkan penguatan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila yang secara simultan diintroduksi ke berbagai jenjang pendidikan yang menjalankan program literasi digital.

3) Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Munculnya gerakan radikalisme dan terorisme di tanah air tidak semata-mata didorong oleh hasrat untuk mendirikan sebuah tatanan pemerintahan yang berbeda saja, tapi mayoritas didominasi oleh faktor ekonomi atau kesejahteraan.

Inilah yang menjadi faktor fundamental mengapa begitu banyak gerakan radikal yang eksis. Munculnya gerakan separatisme di Aceh dan Papua misalnya, terjadi karena masyarakat di kedua wilayah tersebut merasa dimarjinalkan hak-hak sosial, politik, dan ekonominya pada masa orde baru. Kebijakan sentralisasi pemerintah mengakibatkan kekayaan sumber daya alam di kedua wilayah tidak dapat dinikmati oleh warga lokal, karena diangkut ke level pusat oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan nasional.

Eksodus sebagian besar warga dunia ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS, juga lebih banyak didominasi oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup agar lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan radikalisme harus segaris dengan upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat terwujud apabila pemerintah menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi yang bersifat konstitusional. Artinya, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD NRI 1945 yang mana sumber kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Radikalisme merupakan tindakan yang menginginkan pergantian sistem negara dengan sistem lain, melalui cara-cara yang tidak konstitusional dan menggunakan instrumen kekerasan. Radikalisme di Indonesia sudah eksis sejak awal kemerdekaan dengan adanya gerakan-gerakan separatis seperti DI/TII dan NII, hingga pemberontakan PKI pada 1948 dan 1965. Dewasa ini, aksi-aksi radikalisme dan terorisme semakin masif seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

## **B. Saran**

Perlunya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme yang semakin masif ditemukan di masyarakat dengan nilai-nilai multikultur sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya aksi-aksi radikalisme dan terorisme tersebut di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aly Abdullah, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.

Banks A James, *An Introduction to Multicultural Education*, Cet. IV; Boston: Pearson, 2008. \_\_\_\_\_, and Cherry A. McGee Banks, Ed. *Multicultural Education: Issues and Perspectives* Seattle and Bothel: Jhon Wiley & Sons Inc., 2010.

Kementerian Agama RI, AGPAII, Tifa, Rahima, dan Ditpais, *Panduan Integrasi Nilai Multikultur Dalam Pendidikan Agama Islam Pada SMA dan SMK*, Cet. II; Jakarta: Kirana Cakra Buana, 2011.

Mahfud Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mulyana, *Demokrasi Dalam Budaya Lokal*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.  
Salmiwati, *Urgensi Pendidikan Agama Islam dan Pengembangan Nilai-nilai Multikultural*, *Jurnal Ta'lim* Vol. 20, No.1(2013).

Suparta Mundzier, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi Atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Al Ghazali Center, 2008.

Suyanto, Joko. (2010). *Gender dan Sosialisasi*. Jakarta: Nobel Edomedia.

Slamet, *Pengembangan Model Manajemen Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Nilai-Nilai Multikultural Bagi Guru Sejarah SMA*, *Disertasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2017.

Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011).

<http://kbbi.web.id/sosialisasi>. Diakses tanggal 10 April 2020